

PEMETAAN KAWASAN KUMUH KOTA MADIUN BERDASARKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN

SLUM CITY AREA MAPPING MADIUN ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE BASED ON AVAILABILITY

Suning

Program Studi Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya

Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya

Email: sun_brilly@yahoo.com

Abstrak: Penduduk Indonesia yang bermukim diperkotaan telah mencapai 112 juta jiwa. Hampir seperempat dari penduduk perkotaan tersebut (23,1%), atau sekitar 25 juta jiwa, hidup di kawasan permukiman kumuh. Ini artinya hampir 10% dari total penduduk Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dalam pembangunan perkotaan, khususnya perumahan dan permukiman perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kawasan kumuh berdasarkan ketersediaan infrastruktur lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan ada kontribusi secara langsung terhadap perbaikan lingkungan masyarakat Kota Madiun yang berada di kawasan kumuh, dan bahan masukan bagi Pemerintah Kota dalam kebijakannya terhadap permukiman. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif berdasarkan fenomenologi di lapangan serta menggunakan analisa overlay guna memetakan kondisi kawasan kumuh. Faktor kriteria yang digunakan adalah kondisi permukiman penduduk, kondisi jalan lingkungan dan sanitasi dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah Kota Madiun 33,23 Km², menunjukkan kawasan yang tergolong kumuh sedang sebesar 11,87 Km², kumuh ringan 9,15 Km² dan kawasan tidak kumuh 12,21 Km². Hasil pemetaan tersebut kemudian dibuat suatu strategi kebijakan dalam menangani kawasan kumuh, dan kebijakan tersebut harus bersifat integral mulai dari masyarakat sampai pada pemerintah kota. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui seberapa besar masyarakat Kota Madiun masih berada di kawasan kumuh sehingga kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengurangi penduduk yang bermukim di kawasan kumuh.

Kata kunci: Infrastruktur lingkungan, penduduk, pemetaan, dan permukiman kumuh.

Abstract: Indonesian's population living in urban areas has reached 112 million inhabitants. Almost a quarter of the urban population (23.1%), or about 25 million people are live in slum areas. This means that almost 10% of the total population of Indonesia still needs serious attention in urban development, especially housing and urban settlements. This research is indeed to map the area of slums on the availability of environmental infrastructure. The results of this research is expected to contribute directly towards environmental improvements Madiun community residing in the slum area, and an input for the Government in its policy toward the settlements. This research uses descriptive analysis based on phenomenology in the field and using overlay analysis to map the slum conditions. Factor criteria used is the condition of settlements, road conditions and basic sanitation environment. The results showed that the total area of 33.23 km² Madiun showed a relatively rundown area was 11.87 km², light slums 9.15 km² and not slum area 12.21 km². Mapping results are then created a policy strategy in dealing with slums, and that policy must be integral starting from the public until the city government. Therefore, research is important in order to find out how much the people of Madison were still in the slums so that government policy is expected to reduce the population living in slums.

Keywords: infrastructure environment, population, mapping, and slums.

PENDAHULUAN

Wilayah kawasan kumuh menurut Bank Dunia (1999) merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Secara sosial demografis kawasan kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi permukiman yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana sosial budaya lainnya. Carolina W (2011) menyatakan permukiman kumuh adalah kumpulan rumah tangga yang tinggal di dekat satu sama lain di sejumlah bangunan seperti rumah tangga yang berbagi satu atau lebih yang tidak memiliki akses untuk air bersih serta akses untuk perbaikan fasilitas sanitasi (tidak terdapatnya ruang tamu dalam rumah). Mangkoedihardjo (2007) menyatakan bahwa sanitasi lingkungan adalah suatu intervensi memotong siklus rantai penyakit pada manusia. Secara tradisi, cara intervensi memotong siklus rantai penyakit itu dilaksanakan melalui pembuangan dan pengolahan limbah manusia, sampah dan air limbah, pengendalian vektor penyakit, dan penyediaan fasilitas kebersihan diri dan domestik.

Herbert j. Gans (2010) mendefinisikan kawasan/permukiman kumuh adalah suatu lingkungan yang buruk dan murah yang ditempati oleh kebanyakan orang-orang miskin. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menempati kantong-kantong permukiman kumuh merupakan dimensi kemanusiaan dalam pembangunan yang tidak dapat dielakkan. Hal ini diperlukan suatu strategi pembangunan yang berbasis kawasan. Sujadmiko (1983) menjelaskan pemukiman harus memegang peranan utama dalam strategi pembangunan nasional dan merupakan motor pertumbuhan dari pembangunan yang bertumpu pada aspek konstruksi dan modernisasi pemukiman.

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan target internasional untuk mengatasi kemiskinan, permukiman kumuh, serta memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi. Untuk mencapai tujuan tersebut sekitar 460.000 orang harus diberikan dengan sarana sanitasi yang baik setiap hari (WHO, 2005).

Hampir seperempat dari penduduk perkotaan tersebut (23,1%), atau sekitar 25 juta jiwa hidup di kawasan permukiman kumuh. Ini artinya hampir 10% dari total penduduk Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dalam pembangunan perkotaan khususnya perumahan dan permukiman perkotaan (Menteri Pekerjaan Umum, 2008). Berkaitan dengan keberadaan permukiman kumuh pemerintah telah berupaya untuk melakukan penataan permukiman kumuh seperti KIP, P2KP, dan P2BPK. Secara keseluruhan program-program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya dapat membantu usaha penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Dimana banyaknya proyek peremajaan permukiman kumuh yang tidak didahului oleh survei sosial guna mengetahui dan mengenali karakteristik masyarakat antara lain: aspek sosial, sumber daya manusia, ekonomi (mata pencaharian), alam, dan fisik seperti kondisi fisik rumah dan lingkungan.

Berdasarkan uraian mengenai definisi kawasan kumuh, Kota Madiun yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas wilayah 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km², masih banyak masyarakat yang menempati kantong-kantong permukiman kumuh perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan kawasan kumuh perkotaan Madiun berdasarkan ketersediaan infrastruktur lingkungan. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada pemetaan kawasan kumuh dilihat dari aspek infrastruktur lingkungan, yaitu kondisi rumah, jalan lingkungan dan sanitasi dasar (MCK, air bersih). Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui prosentase kawasan kumuh yang terdapat di perkotaan Madiun.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey secara sekunder maupun primer. Metode survey primer dilakukan berdasarkan fenomena yang ada di lapangan dengan proses identifikasi penduduk, kondisi lingkungan rumah, jalan dan sanitasi dasar. Sedangkan survey data sekunder diperoleh dari berbagai data dari Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Madiun, yang digunakan untuk memberikan pembobotan pada kondisi infrastruktur yang ada di lingkungan permukiman. Kriteria pembobotan yang digunakan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 2010. Angka pembobotan yang sudah diolah dan diperoleh akan digunakan untuk mendukung proses overlay pemetaan berdasarkan data peta dasar dan peta digital yang diperoleh dari Pemerintah Kota madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Tentang Kawasan Kumuh Kota Madiun Berdasarkan Kebijakan RTRW Kota Madiun

Berdasarkan struktur tata ruang wilayah Kota Madiun, kawasan kumuh masih terdapat di beberapa permukiman sekitar bantaran sungai. Kondisi fisik permukiman di kawasan ini sangat padat meskipun tidak sampai pada konservasi sungai. Kondisi ini terjadi di kelurahan Pilangbango, Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman. Kemudian ada beberapa wilayah yang kurang berkembang dan perlu di pacu yaitu wilayah yang berada di sebelah barat bengawan madiun, seperti Kelurahan Sogaten, Ngegong, Manguharjo dan Winongo. Penyebab dari perkembangan yang lamban adalah karena aksesibilitas yang masih rendah dan tidak adanya pusat aktifitas perangsang perkembangan wilayah, sehingga kondisi sosial ekonomi juga kurang berkembang yang pada gilirannya lingkungan permukiman menjadi tidak tertata dan kecenderungan kumuh.

Berdasarkan Kebijakan RPJP Kota Madiun Tahun 2009 - 2014

Berdasarkan Visi RPJP Kota Madiun yaitu Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang Maju dan Sejahtera, yang kemudian di dukung oleh Misi RPJP Kota Madiun yaitu; Meningkatkan Pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal, Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial, Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional serta melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Maka ada beberapa isu strategis terkait dengan masalah kawasan kumuh yaitu menurunkan kemiskinan yang identik dengan keberadaan mereka di kawasan kumuh, pengendalian banjir dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pelayanan kesehatan baik pemenuhan air bersih, air minum maupun lainnya serta penanganan kantong lingkungan kumuh. Beberapa kelurahan dalam kategori tersebut adalah Kelurahan Tawangrejo dan Kelun Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Kuncen dan Kelurahan Nambangan Kidul.

Berdasarkan Kebijakan RPIJM Kota Madiun Tahun 2009 - 2014

Tujuan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Permukiman/Cipta Karya Kota Madiun ini adalah untuk menyiapkan program pembangunan bidang permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana

yang memadai, sehingga Kota Madiun dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (livable).

HASIL ANALISIS

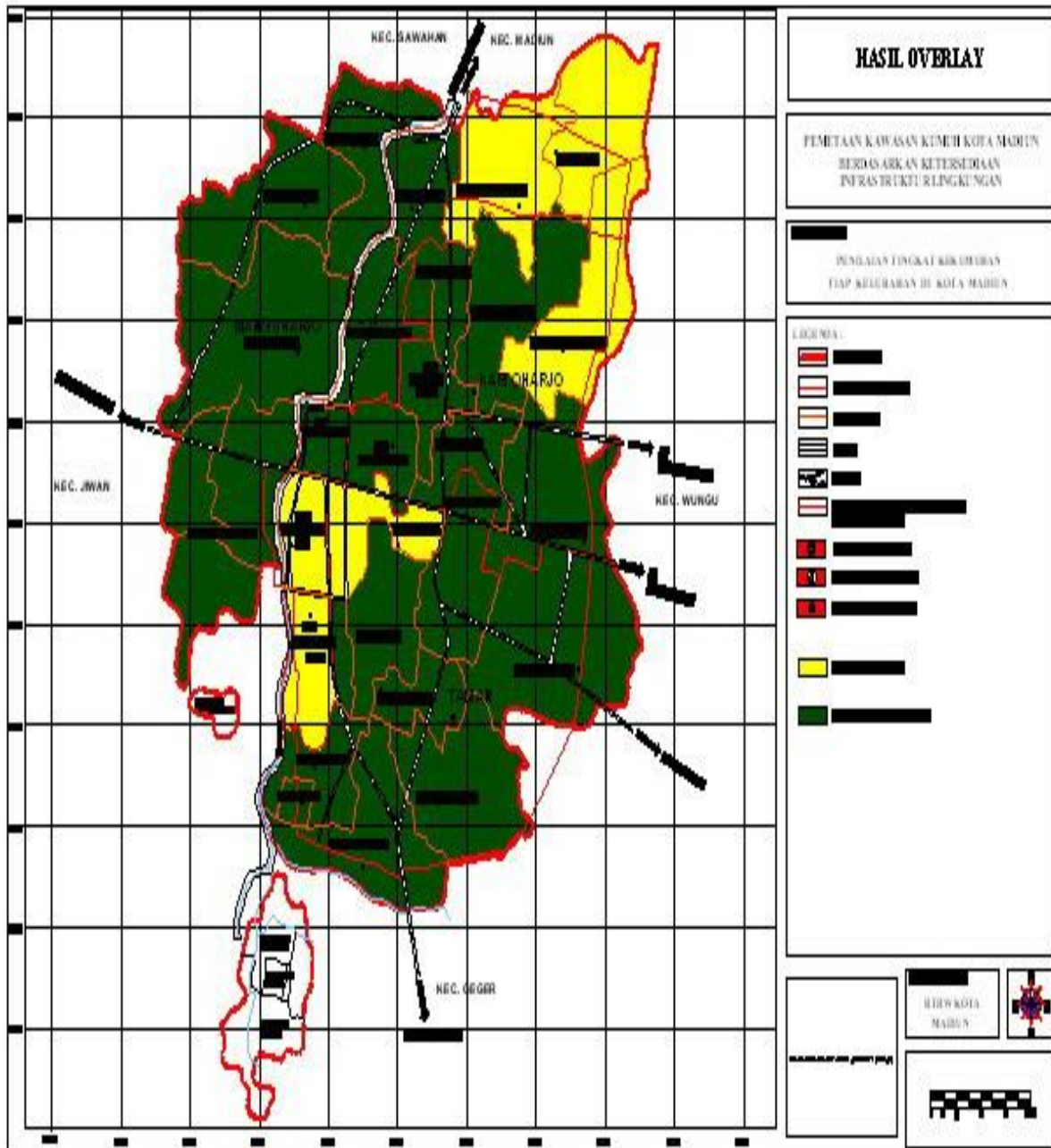
Tabel 1. Hasil penilaian tingkat kekumuhan tiap kelurahan di Kota Madiun.

No.	Kelurahan	Pembobotan Kriteria				Kategori Kawasan Kumuh	
		Vitalitas Non ekonomi	Vitalitas Ekonomi				
Kec. Manguharjo			Vitalitas Ekonomi	Kondisi Prasarana Sarana	Komitmen Pemerintah	Total	
1	Nambangan Kidul	160	30	140	180	510	KR
2	Nambangan Lor	180	30	180	190	580	KS
3	Manguharjo	120	30	130	140	420	TK
4	Pangongangan	110	30	150	140	430	TK
5	Winongo	140	30	120	130	420	TK
6	Madiun Lor	90	30	130	140	390	TK
7	Patihan	110	30	140	130	410	TK
8	Ngegong	110	30	150	130	420	TK
9	Sogaten	110	30	140	130	410	TK
Kec. Kartoharjo							
1	Kartoharjo	100	50	130	140	420	TK
2	Oro-oro Ombo	120	30	150	130	430	TK
3	Klegen	130	30	130	140	430	TK
4	Kanigoro	120	30	130	150	430	TK
5	Pilangbango	120	20	190	150	480	KR
6	Rejomulyo	120	30	130	140	420	TK
7	Sukosari	120	30	140	140	430	TK
8	Tawangrejo	100	30	230	150	510	KR
9	Kelun	140	20	210	160	530	KS
Kec. Taman							
1	Josenan	120	30	130	150	430	TK
2	Kuncen	100	30	130	150	410	TK
3	Demangan	80	30	140	160	410	TK
4	Banjarejo	80	30	140	160	410	TK
5	Pandean	80	30	140	170	420	TK
6	Kejuron	130	20	170	250	570	KS
7	Taman	130	50	130	120	430	TK
8	Mojorejo	120	30	120	130	400	TK
9	Manisrejo	100	30	160	120	410	TK

Ket: KS: Kumuh Sedang, KR: Kumuh Ringan, Tk: Tidak Kumuh.

Proses analisis yang dilakukan untuk memetakan kawasan kumuh adalah dengan melakukan identifikasi terhadap kondisi di lapangan berdasarkan fenomena yang terjadi secara riil dengan memberikan pembobotan pada kondisi infrastruktur yang ada di lingkungan permukiman. Kriteria pembobotan yang digunakan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tahun 2010. Hasil keseluruhan dari pembobotan tertera pada tabel 1. Hasil analisis penilaian tingkat kekumuhan masing-masing kelurahan pada tabel di atas, kemudian dipetakan dengan model overlay sebagaimana pada peta 1.

Peta 1. Hasil pemetaan kawasan kumuh Kota Madiun berdasarkan tingkat kekumuhan.



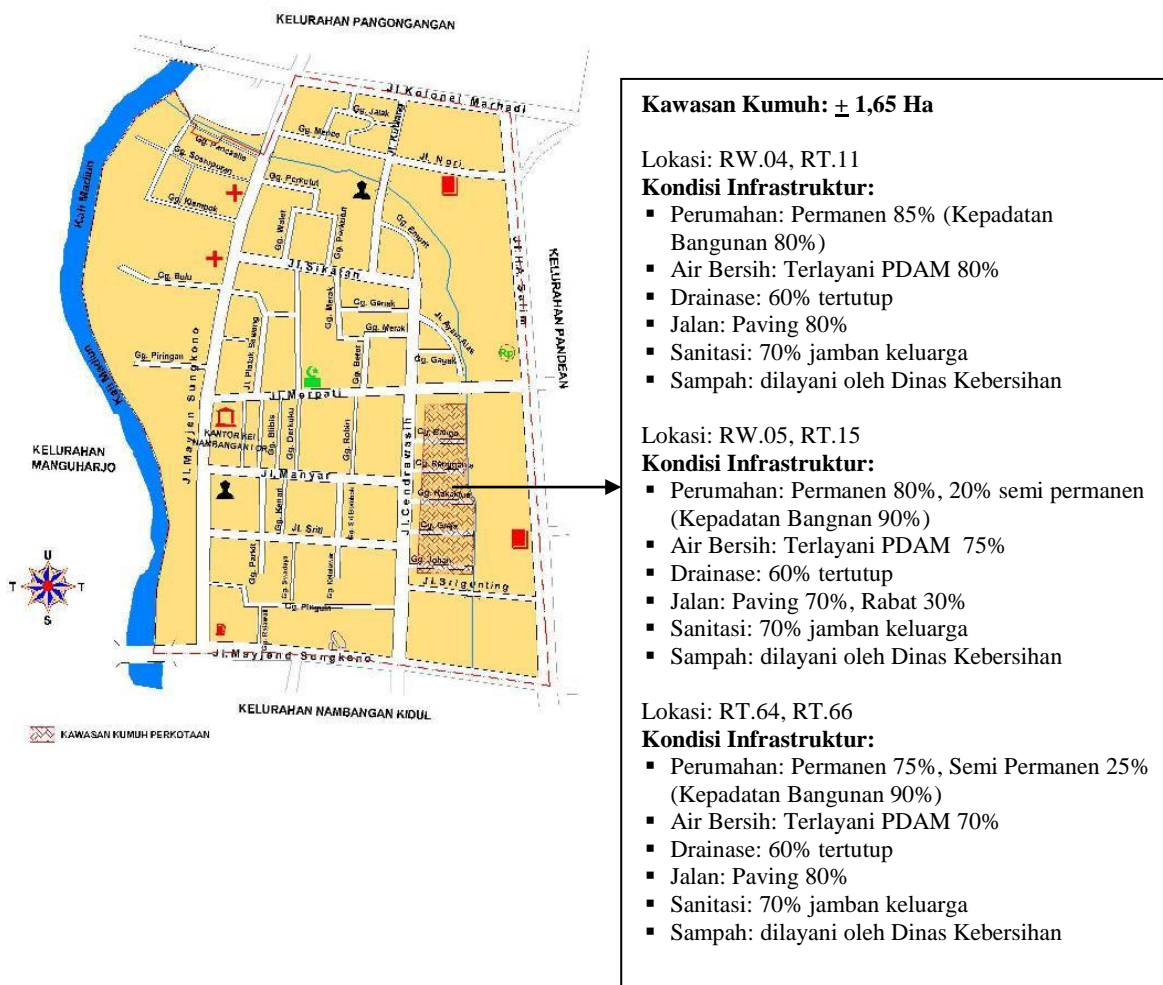
Peta 1 di atas kemudian menghasilkan luasan Kelurahan yang kumuh berdasarkan klasifikasi menurut hasil kumuh sedang dan kumuh ringan sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Luasan dan tingkat kekumuhan tiap zona di Kota Madiun.

Zona	Kelurahan	Tingkat Kekumuhan	Luas Area (Ha)
Kumuh Sedang			
A	Nambangan Lor (Kec. Manguharjo)	Jl. Cendrawasih RT.15/RW.5 RT.11/RW.4 RT.64 dan RT.66	± 1,65 Ha
F	Kelun (Kec. Kartoharjo)	Jl. Jenggolo Manik Jl. Jenggolo Sari Jl. Jenggolo Puro	± 5,33 Ha
G	Kejuron (Kec. Taman)	RT. 02/ RW. 01 RT. 04/ RW. 01 RT. 06/ RW. 01 RT. 07/ RW. 01	± 1,15 Ha
H	Kejuron (Kec. Taman)	RT. 48/ RW. 12 RT. 49/ RW. 12 RT. 50/ RW. 12	± 3,74 Ha
			11,87 Ha
Kumuh Ringan			
B	Nambangan Kidul (Kec. Manguharjo)	Jl. Dadali (RT.16, RT.17)	± 0,86 Ha
C	Nambangan Kidul (Kec. Manguharjo)	Jl. Puter (RT. 14)	± 0,72 Ha
D	Pilangbango (Kec. Kartoharjo)	Jl. Pilang Cipta (RT.19/RW.5) Jl. Pilang Boga (RT.20/RW.5)	± 3,37 Ha
E	Tawangrejo (Kec. Kartoharjo)	Jl. Tawang Asri Jl. Tawang Sakti RT. 50/ RW. 12	± 4,20 Ha
			9,15 Ha

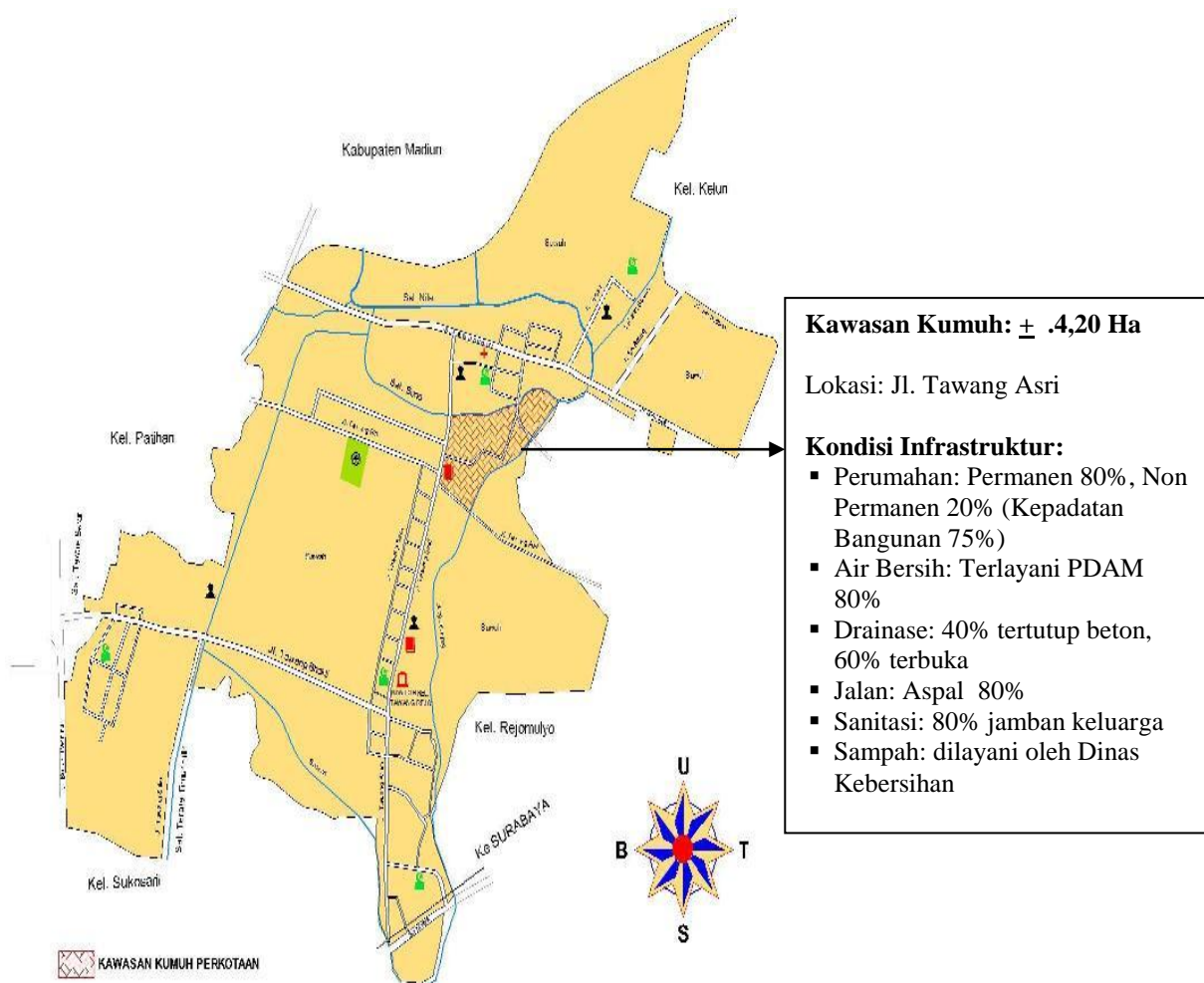
Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisa.

Untuk melihat kondisi riil hasil survey dari penjelasan tabel 2, foto mapping masing-masing kawasan kumuh yang telah terpetakan diwakili peta 1 dan peta 2 (Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo dan Kondisi Kawasan Kumuh Kelurahan Tawangrejo Kec. Kartoharjo) berikut:



Peta 1. Kondisi kawasan kumuh Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo.

Peta 1 dan peta 2 tersebut di atas memberikan informasi bahwa kondisi riil mengenai kekumuhan suatu kawasan yang ada di Kota Madiun antara lokasi satu dengan lokasi lainnya berbeda, meskipun klasifikasi tingkat kekumuhan sama, dalam hal ini adalah kumuh sedang dan kumuh ringan. Peta tersebut ditampilkan agar pemerintah secara langsung dapat mengamati karakteristik perbedaan tingkat kekumuhan antar lokasi yang ada di Kota Madiun, sehingga kebijakan yang dilakukan untuk penanganan kekumuhan juga berbeda antar lokasi satu dengan lokasi lainnya.



Peta 2. Kondisi kawasan kumuh Kelurahan Tawangrejo Kec. Kartoharjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey dan hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum kawasan kumuh perkotaan di Madiun dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat migran. Kaum migran tersebut ada, karena mereka memiliki harapan besar untuk hidup lebih baik di perkotaan tanpa mempertimbangkan keahlian dan kesiapan yang mereka miliki untuk hidup di kota. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kaum migran yang tidak terkontrol adalah menjadikan Kota Madiun kumuh dan kurang tertata, berdasarkan kondisi jalan lingkungan, kepadatan bangunan maupun dari sisi ketersediaan sanitasi dasar. Luas wilayah Kota Madiun 33,23 Km² menunjukkan kawasan yang tergolong kumuh sedang sebesar 11,87 Km², kumuh ringan 9,15 Km² dan kawasan tidak kumuh 12,21 Km². Luasan kawasan kumuh tersebut baik dengan klasifikasi kumuh sedang maupun kumuh ringan secara dominan menempati kantong-kantong permukiman kumuh yang tinggal di bantaran sungai dan rel kereta api. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar prosentase penduduk Kota Madiun yang masih menempati kawasan kumuh.

Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penelitian ini akan lebih tajam pembahasannya apabila peneliti secara pribadi dapat melanjutkannya pada aspek dan metode yang berbeda dengan lokasi per zona sehingga dapat diketahui secara jelas sebab dan akibat mengapa mereka bermukim dipermukiman kumuh.

Daftar Pustaka

- Carolina.W. "Application of Object Oriented Image Analysis in Slum Identification and Mapping-the Case of Kisumu Kenya." Thesis, (2011)
- Guratno. Konsep Perbaikan Kawasan Kumuh dan Peningkatan Kualitas Permukiman. Dipaparkan dalam FGD Perumahan dan Permukiman. Jakarta, 2009.
- Herbert j. Gans. The Urban Vilagers Group and Class in The Life of Italian-Americans. London: The Free Press, 2010.
- Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Penanganan Lingkungan perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2-BK) bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Buku panduan, 2010.
- Laporan Bank Dunia Tentang "Kawasan Kumuh" dalam *www.scribd.com* › *School Work* › *Homework*, 1999.
- Menteri Pekerjaan Umum. Menuju Pembangunan Perkotaan Bebas Kumuh 2025 disampaikan pada seminar Sesi I Dalam Acara Peringatan Hari Habitat Dunia. Bali, 2008.
- Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman Tentang Kriteria Kawasan Kumuh Perkotaan. Pedoman, 2010.
- Mangkoedihardjo, S. "Phytotechnology Integrity in Environmental Sanitation for Sustainable Development." Journal of Applied Sciences Research 3 (10): 1037-1044.
- Sudjatmoko. Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1983.
- World Health Organization/WHO. Water for Life: Making It Happen. WHO: Geneva- Switzerland: 38, 2005.

